

DUALISME EKONOMI-SOSIAL MASYARAKAT DAN KESENJANGAN DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Oleh
Arief Rohman

Abstrak

Kemajuan pembangunan selama Orde Baru sekarang ini telah bisa dilihat hasilnya. Salah satu indikator paling menonjol adalah tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas rata-rata negara umumnya di dunia, yaitu 7% pertahun. Tetapi hal ini kurang diimbangi dengan tingkat pemerataan yang memadai. Akibatnya adalah timbulnya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang dualistis atau dikenal dengan "dualisme ekonomi-sosial masyarakat". Yaitu, munculnya "kelompok elit" secara ekonomi dan sosial di satu sisi, serta "kelompok marginal" di sisi yang lain.

Kondisi demikian pada kenyataannya menjadi prakondisi dan berkedudukan sebagai setting pendidikan yang sangat berperan dalam menciptakan kesenjangan dalam memperoleh pendidikan. Sebagian kelompok masyarakat memperoleh kesempatan lebih besar dalam mengikuti pendidikan (Perguruan Tinggi), sedang kelompok masyarakat lainnya kurang memperolehnya. Sehingga secara logis, ada pengaruh antara kondisi ekonomi-sosial masyarakat yang dualistis terhadap munculnya kesenjangan dalam memperoleh pendidikan.

Oleh karenanya, upaya-upaya untuk mengatasi hal itu telah ditempuh oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dengan cara di samping memberikan peluang yang sama kepada semua warga negara untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi, juga diberikan perlindungan bagi mereka yang secara ekonomi-sosial kurang beruntung (disadvantaged).

Pendahuluan

Kemajuan pembangunan selama Orde Baru sekarang ini telah bisa dilihat hasil-hasilnya terutama di bidang ekonomi dan sosial. Bidang ekonomi misalnya, melalui sektor industri Indonesia telah mampu meningkatkan volume ekspor dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 12% per tahun, sehingga tahun 1991 sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 50% lebih terhadap total ekspor nasional. Sektor jasa mengalami

peningkatan baik jasa telekomunikasi, perhotelan, transportasi maupun lainnya telah berkembang secara kuantitas dan kualitasnya. Serta bidang pertanian sejak Pelita IV Indonesia telah mampu berswasembada dan mengekspor beras; karenanya terhadap PDB, pertanian memberikan sumbangan sebesar 21,30% pada tahun 1991 (Tungki, 1993:73).

Bidang sosial yang berkait erat dengan bidang ekonomi tidak luput dari kemajuan-kemajuan yang dicapai. Tingkat kesejahteraan hidup orang Indonesia semakin baik meliputi pemenuhan gizi, kesehatan, kondisi perumahan, serta pendidikan. Kesemuanya ini sebagai konsekuensi logis dari kemajuan ekonomi yang ada dalam rentang waktu yang terus menerus. Seperti yang dilaporkan pemerintah (Abdul Latif, 1993: 79) secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 7% per tahun, atau 7,9% per tahun selama periode 1971-1980. Oleh karenanya, pembangunan bidang ekonomi dan sosial telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat berarti dalam mengejar ketinggalan pembangunan yang telah dicapai oleh negara-negara maju.

Akan tetapi, kemajuan yang dicapai dengan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi ini kurang diimbangi dengan tingkat pemerataan yang memadai. Persentase "pertumbuhan" memperoleh prioritas lebih tinggi dibanding dengan persentase "pemerataan". Akibatnya adalah munculnya disparitas ekonomi masyarakat yang berkembang pada bidang-bidang sosial secara menyeluruh. Sebagaimana yang dikatakan Frans Seda (1986:131) disparitas tersebut sebagai kondisi "*structural gap*" baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan kata lain, terjadinya dualisme ekonomi-sosial di masyarakat, yakni munculnya "*elit class*" dengan segenap fasilitas dan kemudahan yang dimiliki di satu sisi, serta "*marginal class*" dengan segala keterbatasannya yang dipunyai di sisi yang lain.

Pada konteks ini, akibat terlalu memberikan peluang lebih bagi berkembangnya industri-industri besar demi mengejar pertumbuhan ekonomi nasional serta mengabaikan industri dan perusahaan kecil dan menengah, menjadikan jarak antar-mereka semakin melebar. Juga pada masyarakat pedesaan misalnya, akibat kebijakan "revolusi hijau" yang digencarkan pemerintah Orde Baru sejak tahun 1970 telah menyebabkan terjadinya proses evolusi yang berekses, di mana sistem kelembagaan egaliter masyarakat desa menjadi semakin ter-

tutup sehingga menimbulkan kesenjangan dan polarisasi ekonomi-sosial khususnya di pedesaan Jawa (Collier, 1981: 170). Dari hasil penelitian Ten Dan (Francis Wahono, 1994:9) menunjukkan bahwa polarisasi masyarakat desa tersebut terbagi ke dalam dua kutub kelompok masyarakat, yaitu kelompok "petani independen" dan kelompok "buruh tani".

Potret polarisasi ekonomi-sosial masyarakat ini, kalau dicermati secara seksama, hampir terjadi di banyak bagian kawasan Indonesia. Sehingga, banyak ahli berkesimpulan bahwa salah satu eksek dari upaya pembangunan yang memprioritaskan "pertumbuhan" (growth), memiliki dampak pada munculnya polarisasi ekonomi-sosial masyarakat di Indonesia.

Pada bagian lain fenomena pendidikan khususnya pendidikan tinggi di Indonesia, banyak penduduk usia 19 sampai 24 tahun -yang notabene usia mahasiswa- ternyata hanya sekitar 9% yang bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Menurut laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1993) dijelaskan ada sejumlah 21,30 juta penduduk Indonesia kelompok umur 19-24 tahun, akan tetapi dari sejumlah itu yang bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi hanya sekitar 2,005 juta. Lebih jauh lagi, dari jumlah yang menjadi mahasiswa itu hanya 0,225 juta yang bisa lulus perguruan tinggi, yang berarti hanya 1,05%-nya dari penduduk kelompok usia 19-24 tahun.

Dari gambaran ini menunjukkan secara sekilas betapa sedikitnya pemuda Indonesia yang berkesempatan merasakan belajar di Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi masih merupakan barang mahal dan terkesan "elit" oleh beberapa kalangan. Oleh karenanya, pertanyaan yang muncul adalah, apakah sedikitnya jumlah penduduk usia 19-24 tahun yang tertampung di Perguruan Tinggi ini karena terbatasnya daya tampung atau karena mahalnya biaya pendidikan? Adakah hubungan logis antara kondisi ekonomi-sosial masyarakat yang dualistis dengan perbedaan (disparitas) kesempatan untuk memperoleh pendidikan di Perguruan Tinggi di Indonesia? Barangkali tulisan ini akan mengupas lebih jauh terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Pola Hubungan Pendidikan dan Masyarakat

Lembaga pendidikan sebagai suatu sistem pada dasar-

nya memiliki kedudukan penting di dalam masyarakat. Terutama di masyarakat yang sedang berkembang (developing countries), lembaga pendidikan dapat mendorong tumbuhnya pembangunan. Dalam hal ini pendidikan dapat berfungsi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, yaitu meningkatkan kemampuan warga masyarakat untuk melestarikan nilai, untuk membuat kreasi budaya dan teknologi, serta untuk menyiapkan manusia produktif termasuk tenaga kerjanya (Noeng Muhadjir, 1986:6).

Lembaga pendidikan bisa menelorkan hal-hal baru yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat. Sebagaimana teori sumberdaya manusia yang dicetuskan T.W. Schultz (Imam Barnadib, 1987:28) bahwa suatu masyarakat pada hakikatnya berlandaskan pada investasi manusiawi. Menurut teori ini masyarakat bisa berkembang maju manakala terdapat kualitas sumberdaya manusia yang cukup di dalamnya. Sehingga sesuai dengan teori ini, pendidikan mempunyai peranan sangat penting untuk meningkatkan kualitas manusia, baik dalam arti kualitas intelektual maupun kualitas ketrampilan profesional.

Sebaliknya, kondisi masyarakat juga mampu mempengaruhi bentuk dan corak lembaga pendidikan. Masyarakat memiliki harapan-harapan dan cita-cita yang ingin dicapai disalurkan kepada lembaga pendidikan dengan melalui kebijakan publik. Hal ini terlihat seperti keputusan-keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur lembaga pendidikan pada dasarnya bersumber dari usulan-usulan masyarakat, atau hasil penjabaran dari Tap MPR yang merupakan penjelmaan dari ketetapan masyarakat.

Lembaga pendidikan juga selalu berinteraksi dengan masyarakat. Dalam interaksi ini banyak masukan-masukan yang diperoleh dari masyarakat, misalnya kritik tentang sistem penyelenggaraan pendidikan (feed back) atau perubahan-perubahan sosial-ekonomi-politik yang berpengaruh langsung terhadap lembaga pendidikan.

Dengan demikian, antara lembaga pendidikan dengan masyarakat terjadi hubungan yang dialektis, sebagaimana digambarkan oleh Fagerlind dan Saha (Imam Barnadib, 1987: 86) dengan diagram sebagai berikut.

Gambar 1
Saling hubungan antara pendidikan dan masyarakat



Dualisme Ekonomi-Sosial Masyarakat dan Kesenjangan dalam Memperoleh Pendidikan Tinggi

Pembangunan yang dilaksanakan selama Orde Baru oleh bangsa Indonesia lebih banyak memprioritaskan "pertumbuhan" (growth) dibanding "pemerataan" (equality). Karena terlalu mengejar pertumbuhan dengan hasil pertumbuhan rata-rata 7% per tahun, serta kurang menghiraukan pemerataan, berakibat pada munculnya kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Atau lebih dikenal dengan istilah "Dualisme Ekonomi-sosial Masyarakat".

Sebagaimana diterangkan Kuznets (1955:18) dalam teorinya. Bahwa apabila tingkat pertumbuhan yang tinggi pada awal pembangunan ekonomi yang akan dicapai, maka kesenjangan dalam pembagian pendapatan tidak dapat dihindarkan. Sebaliknya, jika pembagian pendapatan yang menjadi sasaran prioritas, maka tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan sendirinya bukan menjadi prioritas.

Dengan memperhatikan teori ini, dapat diperoleh pengertian tentang hubungan terbalik antara pertumbuhan (growth) dan pemerataan (equality). Bila yang satu diprioritaskan maka yang lainnya akan terkesampingkan, sebaliknya bila yang satu dikesampingkan maka yang lainnya akan menjadi prioritas. Menurut Kuznets (1965:288) jika pembangunan terlalu lama mementingkan pertumbuhan dan tingkat pemerataan pendapatan berkurang, atau sebagian besar masyarakat tidak dapat memperoleh pendapatan yang layak, maka kesenjangan akan terjadi semakin tinggi.

Kenyataan yang terjadi di negara kita wujud dari kesenjangan tersebut berupa polarisasi kelompok masyarakat dari kutub tertinggi, yaitu "kelompok elit" sampai kepada kutub terendah yaitu "kelompok marginal". Kelompok elit

dengan jumlah yang sedikit telah menikmati pendapatan nasional terbesar. Menurut laporan Bank Dunia 1987, sejumlah 20% kelompok elit masyarakat di negara-negara berkembang telah menikmati 60% pendapatan (Nurimansjah, 1989:11). Sebaliknya, kelompok marginal dengan jumlah mayoritas hanya mengenyam pendapatan sedikit sisanya.

Kondisi ini memiliki implikasi terhadap dunia pendidikan tinggi kita. Potret pendidikan tinggi di Indonesia di samping penyebarannya hanya terpusat di daerah-daerah sentral kawasan elit seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Medan, serta kota-kota besar lainnya, juga dari sejumlah Perguruan Tinggi yang ada mayoritas hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi-sosial. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa pemikiran:

1. Sedikitnya jumlah lembaga Perguruan Tinggi negeri dan swasta yang hanya menampung mahasiswa sejumlah 29,6% dari total lulusan SLTA yang ada, atau hanya sekitar 9% dari pemuda Indonesia yang berusia 19 tahun (laporan Mendikbud, 1993). Sehingga secara logis dapat dikatakan bahwa hanya beberapa orang saja dari lulusan SLTA yang secara pribadi (intelektual, sosial, dan ekonomi) mampu untuk bisa mengenyam belajar di Perguruan Tinggi.
2. Mahalnya biaya penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi khususnya untuk Perguruan Tinggi swasta, berlanjut pada Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yang harus dibayarkan oleh mahasiswa kepada lembaga relatif tinggi. Tentu saja dengan biaya SPP yang tinggi, maka masyarakat dengan tingkat sosial-ekonomi tinggi yang mampu membayar SPP tinggi tersebut. Sedang kelompok masyarakat yang tidak mampu membayarnya dengan sendirinya "terpentak" keluar.
3. Secara wajar kelompok elit masyarakat memiliki akses dan interaksi pergaulan lebih luas dibanding dengan kelompok marginal. Karena memiliki akses dan interaksi luas dengan berbagai individu dan lembaga profesi, maka motivasi dan peluang kelompok elit masyarakat untuk belajar di Perguruan Tinggi lebih terbuka.

Realitas di lapangan juga mengindikasikan adanya bukti bahwa tingginya biaya pendidikan di Perguruan Tinggi telah menjadi "kewajaran" (equity) menurut anggapan mayoritas

masyarakat. Menurut Noeng Muhadjir (1986:25-26) sekarang ini terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, berbarengan dengan itu ada upaya oleh mereka untuk mempertinggi sumbangan pendidikan yang dibayarkan siswa kepada lembaga.

Pada bagian lain Perguruan Tinggi negeri selama beberapa tahun terakhir mengindikasikan kecenderungan tingkat SPP yang dibayarkan mahasiswa baru tiap dua tahun mengalami kenaikan. Hal ini secara relatif akan memperkecil peluang dari golongan marginal untuk mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi baik negeri sekalipun, apalagi swasta. Walaupun dari golongan marginal ini pada awalnya bisa masuk diterima di salah satu PTN atau PTS dengan mengandalkan modal kecerdasannya, namun hambatan biaya, kesibukan menghidupi diri, serta lain-lain yang menyimpannya memungkinkan mereka tidak mampu menyelesaikan studi.

Data dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (1993) menunjukkan, dari sejumlah 465.600 mahasiswa baru di Perguruan Tinggi negeri dan swasta, hanya 224.600 orang saja yang akhirnya bisa menyelesaikan studi. Bahkan yang dikutip Djohar (1993:93) bahwa terdapat angka produktivitas untuk Perguruan Tinggi program S0 sejumlah 9,95% pada tahun 1989 dan 10,20% pada tahun 1990. Sedangkan untuk program S1 sejumlah 5,13% pada tahun 1989 dan 7,56% pada tahun 1990. Produktivitas pendidikan adalah rasio atau perbandingan antara jumlah lulusan dengan jumlah siswa terdaftar per tahun yang dinyatakan dengan persen (Djohar, 1993:88).

Data-data di atas memberikan gambaran bahwa banyak sekali jumlah mahasiswa baru yang diterima di Perguruan Tinggi negeri dan swasta, akan tetapi di tengah jalan banyak mengalami hambatan yang menyebabkan hanya beberapa persen saja yang akhirnya bisa lulus. Adapun hambatan yang menyebabkan mereka gagal melanjutkan studi (drop out) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. **Internal factors** (faktor-faktor internal), seperti: kemampuan intelektual dan motivasi belajar yang kurang.
2. **External factors** (faktor-faktor eksternal), seperti: kondisi ekonomi yang kurang mendukung dan tawaran kerja dari pihak luar (perusahaan swasta).

(Hasil wawancara **Suara Pembaruan** dengan beberapa Rektor Perguruan Tinggi negeri di Indonesia, 2 Mei 1995).

Di antara faktor-faktor penghambat di atas, hambatan ekonomi merupakan salah satu hal yang dirasa berat khususnya bagi para mahasiswa yang berasal dari pedesaan dan dari golongan ekonomi "marginal".

Strategi Memperluas Kesempatan

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam belajar, maka kebijakan pemerintah sejak Pelita VI khususnya bidang pendidikan memunculkan frase-frase kebijakan di antaranya adalah "pemerataan pendidikan" (Mendikbud, 1993).

Dalam kebijakan "pemerataan pendidikan" tersebut, terkandung tiga arti yang terkait dengan istilah pemerataan, yaitu: (a) persamaan kesempatan (equality of opportunity), (b) aksesibilitas, dan (c) keadilan atau kewajaran (equity).

Pemerataan kesempatan (ekualitas) berarti bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang menurut UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status ekonomi-sosial, agama, dan lokasi geografis. Dalam kerangka ini pendidikan untuk semua orang (education for all) harus diupayakan dan ditingkatkan.

Aksesibilitas berarti bahwa setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan.

Menurut Mendikbud (1993), untuk menunjang ekualitas dan aksesibilitas, maka harus ada ekuitas, yang lebih menunjuk pada dimensi vertikal dari pendidikan. Dalam arti, di samping memberikan peluang yang sama kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan: jenis, jenjang, dan jalur mana saja, juga memberikan perlakuan khusus secara proporsional bagi warga negara yang menonjol prestasinya dari daerah-daerah tertentu (menurut standar kelompoknya) dan dari kelompok masyarakat kurang mampu, diberikan peluang untuk mencapai suatu jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dari segi ekuitas, memperlakukan peserta didik menurut kemampuan, bakat, dan minatnya merupakan hal yang adil. Memberikan kesempatan kepada mereka yang

menonjol prestasinya menurut ukuran kelompoknya dari daerah-daerah tertentu untuk mencapai jenjang pendidikan lebih tinggi, merupakan hal yang adil pula. Termasuk memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang secara ekonomi kurang beruntung tetapi dia cerdas, merupakan hal yang adil. Karena keadilan mengandung implikasi "perbedaan" perlakuan sesuai dengan kondisi internal dan eksternal peserta didik.

Untuk lebih memperlancar peluang kesempatan belajar di Perguruan Tinggi khususnya bagi anak-anak dari golongan tidak mampu atau kurang beruntung (*disadvantaged children*), maka dibuatkan program beasiswa TID dan Supersemar bagi yang sudah menjadi mahasiswa. Program Pemilihan Bibit Unggul Daerah (PBUD) diperuntukkan bagi lulusan SLTA yang "dijaring" tanpa melalui tes UMPTN, akan tetapi langsung diterima menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi negeri.

Selain yang disebabkan itu, juga dari perusahaan-perusahaan dan lembaga swasta, seperti Toyota, Ford, dan Republika memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi tetapi cerdas dan berprestasi. Juga bantuan berupa tempat praktik oleh perusahaan swasta terhadap sekolah yang menerapkan model "Dual system".

Akan tetapi, bentuk beasiswa dan bantuan dari perusahaan dan lembaga swasta yang disebut di atas, dirasa masih perlu ditingkatkan lagi. Peran serta masyarakat pengusaha masih dibutuhkan lebih banyak lagi soal bantuan dana dalam rangka memperlancar program-program pendidikan di Indonesia (Suyanto, 1995).

Dengan berbagai macam model beasiswa dan bantuan baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta, baik yang sudah terlaksana maupun yang sedang dirintis, diharapkan dapat memberikan manfaat lebih kepada putra-putri Indonesia pada umumnya maupun anak-anak yang berkecerdasan tinggi dari golongan tidak mampu (kelompok marginal) pada khususnya.

Penutup

Kemajuan pembangunan suatu bangsa tidak seluruhnya kelompok masyarakat menikmati, terutama pembangunan

yang lebih berorientasi pada "pertumbuhan" (growth) daripada "pemerataan" (equality). Bila suatu pembangunan lebih berorientasi pada yang pertama daripada yang kedua, akibat negatifnya adalah terjadinya kesenjangan ekonomi-sosial. Yakni munculnya kelompok masyarakat elit secara ekonomi-sosial di satu sisi, serta kelompok masyarakat marginal secara ekonomi-sosial di sisi lain.

Fenomena masyarakat demikian ternyata berpengaruh pada peluang anggota masyarakat tersebut dalam memasuki Perguruan Tinggi. Kelompok masyarakat yang secara ekonomi-sosial dikatakan "elit" mempunyai peluang lebih besar dibandingkan dengan kelompok "marginal". Sehingga secara logis ada pengaruh positif antara kondisi masyarakat yang secara ekonomi-sosial dualistis terhadap timbulnya kesenjangan dalam memperoleh pendidikan (Perguruan Tinggi), dengan indikator-indikator yang dapat dilihat di lapangan.

Dalam rangka untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah lewat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan upaya "pemerataan pendidikan". Yakni adanya upaya (a) persamaan kesempatan (equality of opportunity), (b) aksesibilitas, dan (c) keadilan atau kewajaran (equity). Yang berarti, di samping memberikan peluang yang sama kepada semua warga negara untuk belajar di Perguruan Tinggi, juga memberikan perlindungan bagi mereka-mereka yang secara ekonomi-sosial kurang beruntung (disadvantaged).

Adapun bentuk bantuan kepada mereka yang sudah berjalan seperti pemberian beasiswa TID dan Supersemar, penjaangan ujian masuk PTN melalui PBUD, juga bentuk bantuan dana maupun fasilitas dari perusahaan-perusahaan dan lembaga swasta. Di samping itu, sekarang ini masih terus digiatkan kampanye oleh pemerintah agar masyarakat pengusaha lebih meningkatkan lagi bantuannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Daftar Pustaka

- Abdul Latief. 1993. "Keterkaitan dan Padanan antara Pendidikan dan Penyediaan Tenaga dalam Pembangunan Nasional" *Jurnal Pendidikan ISPI* No.12 September 1993. Jakarta: Lanto Putra Perkasa.

- Collier William L. 1981. *Agricultural Evolution in Java* dalam G.E. Hansen *Agricultural and Rural Development in Indonesia*. Colorado: Westview Boulder.
- Djohar. 1993. "Produktivitas Sistem Pendidikan Nasional" *Jurnal Pendidikan ISPI* No.13 Oktober 1993. Jakarta: Ianto Putra Perkasa.
- Francis Wahono. 1994. "Dinamika Ekonomi Sosial Desa Sesudah 25 Tahun Revolusi Hijau" *Prisma* No.3 Maret 1994. Jakarta.
- Frans Seda. 1986. *Kemiskinan Struktural dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
- Imam Barnadib. 1987. *Pendidikan Perbandingan Buku Dua*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kuznets, Simon. 1955. *Economic Growth and Income Inequality*. *American Economic Review*, 45 (1).
- _____. 1965. *Inequality in The Sice Distribution of Income: Economic Growth and Structure*. New York: Norton.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1993. "Laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Bapak Presiden dalam rangka Pembukaan Rakernas Depdikbud tahun 1993. *Jurnal Pendidikan ISPI* No.12 September 1993. Jakarta: Ianto Putra Perkasa.
- Noeng Muhadjir. 1986. *Alternatif Kebijakan Pendidikan Menuju Era Negara Industri: Suatu Analisis Makropedagogik*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Nurimansjah Hasibuan. 1989. "Pemerataan, Pertumbuhan dan Konsentrasi Ekonomi dalam Proses Industrialisasi." *Prisma* No.9 Tahun 1989. Jakarta: LP3ES.
- Suyanto. 1995. "Agenda dan Persoalan Esensial Pendidikan Nasional" *Kompas* 2 Mei 1995.
- Tungki Ariwibowo. 1993. "Relevansi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dunia Usaha dan Industri" *Jurnal Pendidikan ISPI* No.12, September 1993. Jakarta: Ianto Putra Perkasa.